

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan cabang dari ilmu sosial, sehingga politik sangat berhubungan erat dengan sosial. Kedua bidang keilmuan tersebut sama-sama memilih manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sebagai objek. Ilmu-ilmu tersebut mempelajari tentang tata kelakuan, cara-cara manusia hidup, serta cara-cara manusia dalam bekerja sama membangun tatanan peradaban. Walaupun demikian, kedua bidang ilmu tersebut tetap memiliki batasan kajiannya. Politik mencakup tentang negara, hirarki, lembaga-lembaga pemerintahan, struktur politik, pembangunan politik, dan kekuasaan.¹ Sedangkan bidang sosial lebih mengkaji pada aspek kondisi masyarakat, demografi, lapisan masyarakat, proses sosial, perubahan sosial, struktur sosial, ekonomi, dan sebagainya.²

Kondisi sosial dan politik akan selalu mengalami dinamika pada setiap zamannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu adanya konflik atau peperangan. Konflik menjadi penyebab hilangnya rasa aman di masyarakat, kerusakan lingkungan, kerusakan pranata sosial, kerugian harta

¹Gusti Made Suhartana, "Kajian Politik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2016): 117–122. Hlm. 117

²Selvie M. Tumengkol, *Masalah Sosial Sebagai Dampak Perubahan Sosial Dan Upaya Pemecahannya (Studi Kasus Masalah Kemiskinan)* (Manado, 2012). Hlm. 1

benda, korban jiwa, trauma psikologis, bahkan melebar kepada terhambatnya kesejahteraan umum.³

Daerah-daerah di Indonesia juga mengalami perubahan kondisi tatanan sosial dan politik akibat adanya konflik, salah satunya yaitu pada periode revolusi kemerdekaan. Situasi politik yang tidak menentu semakin memperkeruh keadaan, sehingga membuat masyarakat terkena dampak dari adanya hal tersebut. Masyarakat banyak kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa orang-orang terdekat mereka. Keadaan suatu pemerintahan juga dijalankan secara tidak stabil dan darurat.

Keadaan itu dapat sedikit membaik setelah adanya antara kedua belah pihak yang berkonflik antara Indonesia dan Belanda bersepakat untuk mengakhiri sengketa ini dimulai ketika digelarnya Konferensi Meja Bundar hingga penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Pada awal tahun 1950 menjadi langkah awal beberapa daerah di Indonesia melakukan pembenahan dan perbaikan baik dari segi politik hingga sosial masyarakat. Salah satu diantaranya yaitu Kabupaten Majalengka yang masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat mulai berbenah pasca darurat revolusi.

Majalengka merupakan daerah yang sudah terlihat eksistensinya dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Di Majalengka terjadi serangkaian pertempuran Agresi Militer I dan II yang membuat beberapa laskar pejuang turut serta bergerilya dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia.

³Alfitra, Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern (Ponorogo: Wade Publish, 2017). Hlm. 9

Para pejuang dari Majalengka tersebut memilih basis di sekitar Gunung Ciremai. Ditambah lagi dengan adanya gerakan-gerakan sosial dan gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok Negara Pasundan serta DI/TII menambah kekacauan yang terjadi di Majalengka.⁴

Majalengka mulai berbenah baik dari segi pemerintahan, perekonomian, dan sosial dimulai pada 1 Maret 1950 dengan diangkatnya Raden Mohamad Nur Atmadibrata sebagai bupati Kabupaten Majalengka ke 13. Raden Mohamad Nur Atmadibrata sebelumnya merupakan tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus menjadi bupati Kabupaten Kuningan, beliau bersama tokoh-tokoh pejuang lain seperti M. Chavil (Bupati Majalengka), R. Umar Said (Bupati Cirebon), R.A. Sutisna, Niti Sasmita, Sudjono, D. Apandi, dan masih banyak lagi menjadi tentara pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.⁵

Setelah kembalinya bentuk negara menjadi NKRI. Raden Mohamad Nur Atmadibrata diangkat menjadi bupati Kabupaten Majalengka dengan mengusung visi “*Madjalengka Gaja Baru* dan *Majalengka Kota Sutra*”, Majalengka Gaya Baru yang mensimbolisasikan semangat dan asa membangun Kabupaten Majalengka dengan gaya “Indonesia” dan lepas dari pengaruh penjajahan bangsa lain. Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata lebih memfokuskan pada bidang agraria melalui kebijakan pemberhentian hak-hak perusahaan asing yang kemudian lahan bekas perusahaan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dikelola baik itu untuk

⁴Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H.Abdul Halim* (Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008). Hlm. 135-145

⁵Dewan Harian Cabang Angkatan 45, *Perjuangan Rakyat Kuningan: Masa Revolusi Kemerdekaan* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2006). Hlm. 286

pemukiman, perkebunan, bangunan umum, dan sebagainya. Keseriusan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata untuk lepas dari pengaruh asing juga terlihat di bidang perekonomian, beliau mendirikan pusat koperasi beserta unit-unit koperasi di pedesaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pribumi Majalengka.

Kemajuan Majalengka pada masa pemerintahan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata terlihat dari kondisi sosial Kabupaten Majalengka yang ditangani dengan baik pada waktu itu. Masalah kemiskinan, pengemis, dan anak yatim diatasi dengan mendirikan “Rumah Yatim” untuk merawat dan mencukupi kebutuhannya. Selain itu, penanganan korban bencana dan korban perang kemerdekaan dilakukan dengan bantuan berupa kebutuhan pokok, uang tunai, dan perbaikan pemukiman.⁶ Pada masa pemerintahan Raden Mohamad Nur Atmadibrata masih banyak lagi kebijakan dalam menangani permasalahan sosial seperti, kemiskinan, agraria, pemukiman penduduk, ekonomi, dan sebagainya.

Kondisi Politik yang terjadi di Kabupaten Majalengka pada masa pemerintahan Raden Mohamad Nur Atmadibrata mengalami pasang surut karena pada saat itu situasi politik belum stabil yang disebabkan oleh baru dijalankannya kembali pemerintahan daerah, sehingga alat kelengkapan pemerintahan masih seadanya. Pada awal 1950, kantor-kantor jawatan pemerintahan belum tersedia, mulai pada masa pemerintahan Raden Mohamad Nur Atmadibrata perlahan-lahan mulai dibangun. Selain itu, pada 1950 hingga 1951 terjadi dualisme antara pegawai

⁶Abdul Azis Halim, *Sewindu Di Madjalengka* (Majalengka: Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Madjalengka, 1958). Hlm. 72

pemerintah yang pro terhadap NKRI atau mendukung pemerintahan bupati saat itu serta ada pegawai yang kontra karena keterlibatan terhadap Negara Pasundan. Disamping itu, ketidakstabilan politik di Kabupaten Majalengka juga turut dipengaruhi oleh munculnya gerakan DI/TII mulai pada tahun 1952. DI/TII tersebut menguasai beberapa wilayah di Majalengka bagian Selatan yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Majalengka menetakannya sebagai situasi darurat perang atau SOB.⁷ Pada awal 1950 saat ditetapkannya sistem parlementer, gairah berdemokrasi di Indonesia sedang tinggi-tingginya, hasilnya banyak bermunculan partai politik serta organisasi massa yang mengutamakan kepentingannya masing-masing.

Gairah berdemokrasi tersebut dirasakan pula di Majalengka pada 1953 mulai dibentuk cabang dari partai-partai politik nasional seperti Masyumi, PNI, PKI, dan PSII, serta ada pula partai-partai daerah seperti Tani Mukti, Paguyuban Pasundan, dan PRIM. Pada tahun 1955 diselenggarakan Pemilu DPR RI dan pada 1957 diadakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten serta Provinsi. Pelaksanaan pemilu DPRD 1957 diikuti oleh 48 partai dengan partai Masyumi unggul sebanyak 97.712 suara, PNI 90.248 suara, dan PKI 65.538 suara.⁸ Sedangkan pemenang Pemilu 1955 di Majalengka adalah PNI dan disusul oleh Masyumi di urutan kedua.⁹ Kondisi politik yang terjadi pada masa itu penuh dengan pergolakan, sehingga menimbulkan dampak pada masa pemerintahan pasca bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata.

⁷*Ibid.* Hlm. 51

⁸*Ibid.* Hlm. 78-79

⁹Soegiarhadi Djojounarko, *Majalengka Selayang Pandang* (Majalengka: Panitia Peringatan Hari Jadi Majalengka, 1983). Hlm. 26

Raden Mohamad Nur Atmadibrata meninggalkan jasa besar kepada Kabupaten Majalengka, sehingga pada periode pemerintahan bupati harus dapat mempertahankan pencapaian serta melanjutkan program yang telah dibuat. Selain itu, kondisi dinamika sosial dan politik yang terjadi pada masa bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata memberikan dampak yang serius terhadap periode bupati berikutnya, seperti pada masa Abdul Azis Halim dan pada masa Raden Aria Sutisna (R.A. Sutisna). Periode Abdul Azis Halim (1958-1959) merupakan periode singkat yang hanya satu tahun melanjutkan pekerjaan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata berupa peresmian Balai Pertemuan Muslimin (Bapermin), penyelesaian jalan Talaga – Campaga, dan meningkatkan program bagi Yayasan Taman Pendidikan Anak. Selanjutnya periode R.A. Sutisna yang berfokus pada penyelesaian gejolak politik DI/TII dan meredam kekuatan PKI pada 1965-1966.

Batasan spasial dalam penelitian ini yaitu wilayah Kabupaten Majalengka. Kemudian, batasan temporalnya yaitu tahun 1950 hingga 1958 karena berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentukan pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka yang berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.¹⁰ Pemilihan tahun 1958 sebagai batas akhir temporal dalam penelitian ini adalah karena pada saat itu bertepatan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata. Peneliti memilih

¹⁰*Undang-Undang RI Nomor 14 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Jakarta, 1950). Di akses pada 14 Januari 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59691#:~:text=UU%20No.%2014%20Tahun%201950,Djawa%20Barat%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>*

periode kepemimpinan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata karena menjadi bupati Majalengka pertama pasca revolusi.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka dengan judul “Kondisi Sosial dan Politik Kabupaten Majalengka Di Bawah Kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata 1950-1958”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan apa yang terjadi atau kenyataan, maka sebuah penelitian berguna untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.¹¹ Sejalan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan Raden Mohamad Nur Atmadibrata tahun 1950-1958?”. Rumusan masalah tersebut kemudian dituangkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata pada tahun 1950-1958?
2. Bagaimana kondisi politik Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata pada tahun 1950-1958?

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). Hlm. 55

3. Bagaimana dampak sosial dan politik pasca kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, penelitian yang berjudul “Kondisi Sosial dan politik Kabupaten Majalengka Di Bawah Kepemimpinan Raden Mohamad Nur Atmadibrata 1950-1958” ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan:

1. Kondisi sosial Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata pada tahun 1950-1958;
2. Kondisi politik Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata pada tahun 1950-1958;
3. Dampak sosial dan politik pasca kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan secara teoretis, praktis, dan empiris. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis, penelitian ini berguna sebagai pengembangan historiografi yang berkaitan dengan kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka pada tahun 1950-1958;
2. Kegunaan praktis, penelitian ini berguna untuk bahan referensi kebijakan bagi pemerintah daerah, sebagai bahan refleksi bagi masyarakat Majalengka, serta memberikan gambaran kepada

masyarakat Majalengka mengenai perkembangan kemajuan Kabupaten Majalengka dari waktu ke waktu.

3. Kegunaan empiris, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai perkembangan historiografi Kabupaten Majalengka pasca kemerdekaan agar mampu membentuk historiografi Kabupaten Majalengka secara utuh.

1.5. Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

A. Teori Kebijakan Publik

Secara historis, definisi paling awal mengenai kebijakan publik pernah dikemukakan oleh Harlod Laswell dan Abraham Kaplan yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai, serta praktik tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik ini sebenarnya bukan hanya keputusan pemerintah, bisa juga dengan pemerintah bertindak untuk tidak memutuskan atau tidak mengurus suatu isu tersebut. Singkatnya, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan ataupun yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.¹²

Beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon permasalahan dan krisis. Seperti yang diungkap oleh

¹²Riant Nugroho and H.A.R Tilaar, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm. 185

Chandler dan Plano dalam Tangkilisan, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan publik.¹³

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik serta demi kepentingan bersama.

Kebijakan pemerintah terbagi ke dalam dua kategori yang umum, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pemerintahan yang memusatkan seluruh kebijakan dan kewenangan kepada posisi puncak pada sebuah struktur organisasi. Artinya, pemerintah pusat memegang seluruh kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan dan pemerintah daerah mengikuti kebijakan tersebut untuk diterapkan di daerahnya. Konsep sentralisasi ini banyak digunakan oleh pemerintahan lama di Indonesia sebelum berlakunya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi adalah pengalihan tanggungjawab, kewenangan, dan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintahan daerah lebih dapat merancang kebijakan berdasarkan kebutuhan daerahnya.¹⁴

¹³Hessel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards* (Yogyakarta: Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003).

¹⁴Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 2, no. 1 (2019): 152–170. Hlm. 154-162

Teori kebijakan publik ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati kebijakan yang dikeluarkan oleh Raden Mohamad Nur Atmadibrata sebagai bupati Kabupaten Majalengka untuk menyelesaikan permasalahan publik serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka membangun Majalengka tahun 1950-1958.

B. Teori Kesejahteraan Sosial

Secara naluriah, manusia adalah makhluk yang membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Manusia akan melakukan aktivitas yang akan membuat mereka dapat bertahan hidup, di zaman sekarang manusia bukan hanya saja bertahan hidup, melainkan manusia juga harus menjadi manusia yang sejahtera. Menurut Midgley¹⁵, sejahtera terjadi manakala manusia ini hidup aman dan bahagia karena kebutuhan dasarnya seperti gizi, kesehatan, rumah, keuangan, dan pendidikan terpenuhi. Selain itu, sejahtera terjadi manakala manusia dapat memperoleh perlindungan dari resiko-resiko yang mengancam kehidupannya.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganya sehingga mampu mengembangkan diri, dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharuskan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sosial rakyatnya, seperti kebutuhan

¹⁵Iswinda Stephanie, “Analisis Program Bantuan Pemerintah Terhadap Menurunnya Jumlah Homeless Di Jepang Tahun 2007” (Bina Nusantara, 2010). Hlm. 10

makanan, sandang, tempat tinggal, air minum, serta kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.¹⁶

Sejalan dengan perkembangannya, kesejahteraan sosial termasuk ke dalam sebuah proses atau usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga, dan badan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui adanya layanan sosial dan tunjangan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial didapatkan melalui upaya penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat pada aspek sosial, kesehatan, kebahagiaan, keamanan, ekonomi, pendidikan dan budaya. Kemudian, ukuran kesejahteraan sosial dapat diukur berdasarkan ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan, pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup, dan pembangunan manusia.¹⁷

Pemerintahan daerah Kabupaten sebagai wilayah administrasi yang dipimpin oleh bupati memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Bupati dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh instansi dinas-dinas yang berhubungan dengan masalah sosial, misalnya dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan sebagainya. Sehingga, teori ini dapat mengungkap bagaimana kondisi kesejahteraan sosial serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya pada tahun 1950-1958.

¹⁶*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

¹⁷*Ibid.*

1.5.2 Kajian Pustaka

Buku-buku yang membahas tentang sejarah Kabupaten Majalengka masih sedikit sekali, sehingga peneliti menemui kesulitan dalam mengumpulkannya. Walaupun demikian, peneliti mampu menemukan beberapa buku yang membahas tentang Majalengka. Diantaranya yaitu buku yang ditulis oleh N. Kartika yang berjudul “Sejarah Majalengka: Sindangkasih, Maja, dan Majalengka” terbit tahun 2007 melalui penerbit Uvula Press. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Endi Rochaendi yang berjudul “Sebuah Catatan Majalengka Tempo Dulu: Alam, Manusia & Kehidupan” pada 2020 terbit di Bandung melalui Penerbit Media Sains Indonesia. Selain itu, ada sebuah naskah sumber arsip dari ANRI yang membahas tentang Pemilu 1955, di dalamnya terdapat pembahasan mengenai potret Pemilu di Majalengka. Buku naskah sumber tersebut berjudul “Naskah Arsip Sumber: Jejak Demokrasi Pemilu 1955” yang penyusunannya dipimpin oleh Mustari Irawan (Kepala Arsip Nasional RI) yang terbit pada tahun 2019.

Pertama, Buku berjudul “Naskah Arsip Sumber: Jejak Demokrasi Pemilu 1955” diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019.¹⁸ Di dalam buku arsip sumber tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan Pemilu 1955 yang merupakan gelaran Pemilu pertama di Indonesia. Pada pelaksanaan Pemilu tersebut terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi konstituante, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat

¹⁸Mustari Irawan, *Naskah Arsip Sumber: Jejak Demokrasi Pemilu 1955* (Jakarta: ARSIP NASIONAL RI, 2019).

pemerintah. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai persiapan penyelenggaraan Pemilu yang mana hal tersebut menampilkan antusiasme masyarakat dalam menyambut pelaksanaan Pemilu pertama tersebut, ditambah juga dengan persiapan lembaga penyelenggara Pemilu, persiapan media massa, pendataan, sosialisasi, dan sebagainya.

Buku ini juga menampilkan beberapa dokumen dan arsip terkait pelaksanaan Pemilu 1955, seperti adanya antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak suaranya serta masalah yang muncul selama pelaksanaan Pemilu 1955. Terakhir, dalam buku ini menampilkan pula arsip dan dokumentasi tentang hasil Pemilu 1955 berupa data perolehan suara, pelantikan anggota DPR, dan dampak dari Pemilu 1955 tersebut.¹⁹ Buku ini diambil oleh peneliti sebagai sumber penunjang dalam penelitian ini. Hal tersebut karena terdapat beberapa arsip yang membahas tentang kondisi pelaksanaan Pemilu 1955 di kabupaten Majalengka. Arsip tersebut menjelaskan tentang bagaimana antusiasme penduduk Majalengka dalam mengikuti Pemilu, konflik yang terjadi di Majalengka menjelang Pemilu, serta hasil Pemilu 1955 di Kabupaten Majalengka.²⁰

Kedua, buku yang ditulis oleh Endi Rochaendi yang berjudul “Sebuah Catatan Majalengka Tempo Dulu: Alam, Manusia & Kehidupan” pada 2020 terbit di Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.²¹ Buku tersebut

¹⁹*Ibid.* Hlm. 50-60

²⁰*Ibid.* Hlm. 107-125

²¹Endi Rochaendi, *Sebuah Catatan Majalengka Tempo Dulu: Alam, Manusia & Kehidupan* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 1

membahas tentang sejarah Kabupaten Majalengka dari masa ke masa mulai dari masa praaksara, kehidupan di masa klasik (Hindu Buddha), masa Islam, masa kolonial Belanda, serta sisanya pembahasan tambahan seperti kegiatan perekonomian masyarakat Majalengka, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, gerakan perlawanan yang ada di Majalengka, bangunan tua di Majalengka, kerajinan, tradisi, daftar bupati Majalengka, dan masih banyak lagi.

Buku ini penting sekali peranannya dalam penelitian ini. Peneliti akan menempatkan buku ini sebagai sumber rujukan alternatif yang bersifat sekunder. Selain itu, buku ini juga berisi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti daftar bupati serta kebijakannya, kondisi sosial dan perekonomian masyarakat dari waktu ke waktu. Ditambah lagi dengan adanya pembahasan mengenai pendirian Kabupaten Majalengka berdasarkan beberapa arsip kolonial.

Ketiga, buku yang disusun oleh N. Kartika yang berjudul “Sejarah Majalengka: Sindangkasih, Maja, dan Majalengka” dibukukan tahun 2007 melalui penerbit Uvula Press menjadi sumber dan bahan rujukan dalam penelitian ini.²² Buku tersebut membahas tentang sejarah Kabupaten Majalengka dari masa kerajaan hingga masa kolonial di bahas lengkap dalam buku ini. Selain itu, membahas pula mengenai polemik dari sejarah berdirinya Kabupaten Majalengka. Hal yang masih kontroversial terkait penetapan hari

²²N. Kartika, *Sejarah Majalengka: Sindangkasih, Maja, Dan Majalengka* (Bandung: Uvula Press, 2007).

jadi Kabupaten Majalengka. Buku ini lebih berfokus pada aspek sosial, politik, dan ekonomi Kabupaten Majalengka.

Pembahasan mengenai historiografi Majalengka tersebut hanya membahas sejarah Majalengka dari periode klasik hingga berakhirnya masa kolonial Belanda. Pembahasan sejarah Majalengka pada masa pasca kemerdekaan, masih belum ada yang membahas, apalagi pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia atau masa revolusi kemerdekaan. Hal tersebut yang menjadi landasan pemikiran peneliti untuk menyusun penelitian ini. Buku “Sejarah Majalengka: Sindangkasih, Maja, dan Majalengka” akan menjadi bahan referensi bagi dalam penelitian ini.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini peneliti berusaha memberikan pemaparan mengenai historiografi yang relevan, hal yang akan dibahas dalam penelitian yang relevan tersebut yaitu identitas penelitian (peneliti, judul, tahun, dan sebagainya), hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Historiografi yang relevan dengan penelitian ini yaitu tentang perkembangan sosial dan ekonomi Kabupaten Majalengka pernah diteliti Miftahul Falah dalam artikel yang berjudul “Sejarah Sosial Ekonomi Majalengka pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942)” terbit di

jurnal *Patanjala* volume 3 nomor 2 pada Juni 2021.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Majalengka mengalami penurunan dari yang tadinya 2.29% per tahun pada akhir abad ke-19, menjadi 1.68% pada awal abad ke-20. Akan tetapi, kehidupan masyarakatnya tumbuh secara dinamis, pertanian dan perkebunan menjadi tumpuan utama masyarakatnya, disamping industri yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Tulisan Miftahul Falah tersebut barangkali sudah sedikit menggambarkan kepada kita tentang kondisi sosial serta ekonomi Majalengka, namun itu pada periode kolonial Belanda. Sedangkan, penelitian tentang perkembangan sosial dan politik di Majalengka pada masa awal kemerdekaan Indonesia masih belum ada yang meneliti. Maka, peneliti berkeinginan untuk mengisi ruang kosong historiografi lokal mengenai sejarah Majalengka tersebut. Perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu ada pada aspek temporalnya yaitu memilih tahun 1950 hingga 1958 atau pada awal pasca kemerdekaan. Serta dari bidang kajian yang diteliti yaitu meneliti tentang sosial dan politiknya.

Historiografi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu tulisan yang berjudul “Perkembangan Sosial Di Kabupaten Majalengka (Berdasarkan Data Statistik 2004-2006) oleh H. Iwan Roswandi yang terbit

²³Miftahul Falah, “Sejarah Sosial Ekonomi Majalengka Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942),” *Patanjala* 3, no. 2 (2011): 190–209. Hlm. 206

di jurnal *Patanjala* Vol. 3 No. 3 Tahun 2011²⁴. Penelitian ini berisi tentang perubahan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan penduduk dari tahun ke tahun, lalu adanya faktor keberhasilan pembangunan Majalengka disebabkan karena adanya sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas dengan adanya program wajib belajar 9 tahun, gerakan nasional orang tua asuh, dan berbagai program lainnya. Lalu di bidang pendidikan tersedia beberapa sekolah dimulai dari Diniyah, SD, SMU, dan perguruan tinggi. Lalu di bidang kesehatan terdapat 39 dokter umum, 10 dokter gigi, 295 bidan desa, dan 109 bidan PUSKESMAS.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu mengenai bidang yang diteliti yaitu hanya bidang sosial saja, lalu dari segi temporalnya juga berbeda yaitu 2004-2006, serta data yang diambil adalah data statistik. Sedangkan, penelitian kali ini membahas tentang sejarah Kabupaten Majalengka dilihat dari bidang sosial dan politiknya pada periode 1950-1958. Namun, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam segi kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu mengenai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Penelitian berjudul “Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik Kabupaten Mojokerto pada Masa Pemerintahan Bupati R. Ardi Sriwidjaja 1958-1965” yang disusun oleh Eva

²⁴Iwan Roswandi, “Perkembangan Sosial Di Kabupaten Majalengka (Berdasarkan Data Statistik 2004-2006),” *Patanjala* 3, no. 3 (2011): 520–533. Hlm. 532-533

Lestari sebagai skripsinya di Universitas Airlangga pada tahun 2018.²⁵ Seperti yang disebutkan sebelumnya, fokus penelitian ini membahas tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Kabupaten Mojokerto pada rentang tahun 1958-1965.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu menyoroti kebijakan bupati Ardi Sriwidjaja yang cemerlang dan inovatif, sehingga mampu membawa Mojokerto ke arah yang lebih baik. Padahal, kondisi politik dan ekonomi nasional pada kala itu sedang tidak stabil. Pembangunan yang dilakukan oleh Ardi Sriwidjaja yaitu pendirian SMA pertama di Mojokerto pada 1960, pembangunan saluran irigasi untuk menunjang perekonomian warga, pelestarian budaya dan kesenian lokal. Selain itu, di bidang politik dan keamanan pemerintah membuat kebijakan untuk menjaga masyarakat dari ideologi radikal komunisme yang dibawa oleh PKI dengan mengadakan pelatihan perbentengan diri baik fisik maupun mental. Terakhir, bupati Ardi Sriwidjaja ini pula melakukan peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan dengan membuat desa percontohan di Mojosari.

Sebenarnya penelitian di atas tidak terlalu banyak perbedaan yang signifikan dengan penelitian kali ini. bidang yang dikaji memiliki kesamaan yaitu sosial dan politik. Di dalam hasil penelitiannya juga masih memiliki persamaan dengan rancangan yang telah peneliti buat, misalnya di bidang sosial membahas tentang pertumbuhan masyarakat, kriminalitas, kesehatan,

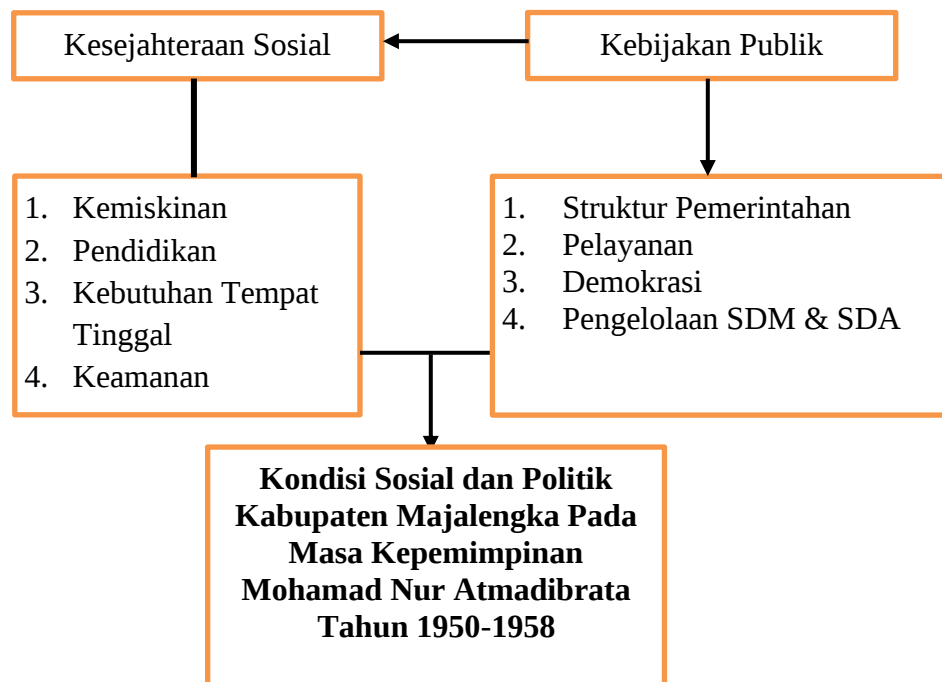
²⁵Eva Lestari, “Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik Kabupaten Mojokerto Pada Masa Pemerintahan Bupati R. Ardi Sriwidjaja 1958-1965” (Universitas Airlangga, 2018).

ekonomi, budaya, serta pendidikan. Sedangkan di bidang politik ada sedikit kesamaan yaitu adanya bahaya ideologi yang mengancam, jika di Mojokerto bahaya ideologi komunisme yang dibawa PKI, sedangkan di Majalengka bahaya ideologi negara Islam yang dibawa DI/TII. Secara temporal juga penelitian ini hampir memiliki kesamaan yaitu rentang tahun 1950-an. Hanya saja perbedaannya yaitu dari aspek spasial yaitu antara Mojokerto dengan Majalengka.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini disusun untuk menentukan pertanyaan penelitian yang harus dijawab dan bagaimana prosedur empiris untuk menjawab pertanyaan tersebut.²⁶ Penelitian ini mengkaji tentang peranan Raden Mohamad Nur Atmadibrata terhadap kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka pada tahun 1950-1958. Penelitian ini dimulai dari kajian kondisi sosial Kabupaten Majalengka tahun 1950-1958, kemudian membahas kondisi politik Kabupaten Majalengka tahun 1950-1958, terakhir mengkaji tentang pengaruh dinamika sosial dan politik yang terjadi pada 1950-1958 di periode bupati-bupati berikutnya.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hlm. 60



Keterangan:

- Berhubungan
- > Berpengaruh

Gambar 1.1.Kerangka Konseptual

1.6. Metode Penelitian Sejarah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta, kondisi, keadaan, serta fenomena-fenomena yang terjadi. Fakta-fakta tersebut disajikan secara apa adanya atau natural.²⁷ Hal tersebut sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Sugiyono²⁸ bahwa penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti

²⁷Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2006). Hlm.11

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hlm. 15

kondisi objek secara alamiah dan tidak dimanipulasi kondisinya, sehingga fakta-fakta lapangan disampaikan secara apa adanya.

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan seperangkat azas serta kaidah yang disusun secara sistematis untuk membantu secara efektif mengumpulkan sumber sejarah, menilainya secara kritis, serta menyajikan sintesis dari hasil analisis dalam bentuk tulisan (historiografi).²⁹ Sedangkan, menurut Louis Gottschalk yang disebut dengan metode sejarah adalah proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau.³⁰ Kesimpulannya bahwa metode sejarah adalah seperangkat kaidah yang disusun secara sistematis untuk menjadi pedoman dalam penelitian sejarah guna menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau. Sebuah metode harus memiliki seperangkat kaidah yang tersusun secara sistematis. Maka, tahapan metode sejarah yang harus dilalui oleh peneliti yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi: analisis dan sintesis, dan historiografi.³¹

1.6.1 Pemilihan Topik

Menurut Dyah Kumalasari³², dalam penelitian ilmiah harus berawal dari pemilihan topik penelitian. Dalam penelitian sejarah, peneliti sejarah

²⁹Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957). Hlm. 33

³⁰Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975). Hlm. 32

³¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hlm. 69

³²Dyah Kumalasari, "Metode Penelitian Sejarah" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011). Hlm. 1

harus memenuhi prasyarat dalam pemilihan topik yaitu (1) topik harus menarik, (2) adanya keunikan, (3) memiliki arti penting dan bermanfaat bagi pengetahuan serta kegunaan lainnya, (4) masalah dalam topik harus memungkinkan untuk diteliti, misalnya sumber pendukungnya tersedia.

Menurut Kuntowijoyo³³, topik dalam penelitian sejarah dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dua syarat tersebut dapat dikatakan sebagai subjektivitas dan objektivitas peneliti. Setelah topik ditemukan, langkah selanjutnya membuat perencanaan penelitian.

Peneliti memilih topik seputar kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka pada tahun 1950-1958 atau pada masa kepemimpinan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata. Pemilihan topik tersebut didasarkan atas temuan penulis pada beberapa literatur seperti buku *Sejarah Tatar Sunda 2* yang ditulis oleh Nina Herlina Lubis, bahwa setelah kembalinya bentuk negara menjadi NKRI membuat beberapa kabupaten di dalam Provinsi Jawa Barat berhak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan UU No. 14 Tahun 1950.³⁴ Kabupaten Majalengka juga termasuk wilayah yang mendapatkan hak tersebut, sehingga tahun 1950 menjadi titik awal pembangunan Kabupaten Majalengka dengan semangat nasional.

Pada tahun 1950-1958 juga terdapat beberapa gejolak politik seperti adanya Negara Pasundan serta pembubarannya pada 1950 dan mulai

³³Kuntowijoyo, *op.cit.* Hlm. 70

³⁴Nina Herlina Lubis, *Sejarah Tatar Sunda 2* (Bandung: Pusat Penelitian Universitas Padjajaran, 2003). Hlm. 270

memanasnya gerakan DI/TII di Kabupaten Majalengka pada 1953 hingga 1960-an, menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya pada tahun 1955 dan 1957 terselenggara pesta demokrasi pertama yaitu Pemilu Konstituante 1955 dan Pemilu Daerah 1957. Selain itu, kehidupan sosial dan politik masyarakat Kabupaten Majalengka pada 1950-1958 menjadi bahasan yang menarik dalam penelitian ini.

1.6.2 Heuristik

Heuristik atau tahapan pengumpulan sumber merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti sejarah untuk mengumpulkan bukti-bukti atau sumber sejarah. Istilah “heuristik” ini diadopsi dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang artinya mencari atau menemukan.³⁵ Berhasil atau tidaknya dalam pengumpulan serta pencarian sumber, umumnya tergantung dari kemampuan maupun wawasan peneliti mengenai sumber-sumber yang dibutuhkan.

Ada dua kategori dalam pengklasifikasian sumber sejarah, diantaranya yaitu ada yang berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bahannya³⁶. Berdasarkan sifatnya, sumber tersebut terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari peristiwa itu terjadi atau peristiwa yang berasal dari waktu yang sama dengan terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan, sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari terjadinya peristiwa yang

³⁵Eva Syarifah Wardah, “Metode Penelitian Sejarah,” *Jurnal Tsaqofah* 12, no. 2 (2020): 163–175. Hml. 169

³⁶Kuntowijoyo, *op.cit.* Hlm. 73

diteliti atau jika menggunakan metode wawancara, orang yang diwawancarainya tidak mengalami langsung peristiwa yang diungkap.³⁷

Pengklasifikasian sumber sejarah berdasarkan bahannya yaitu terdiri dari sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber tertulis biasanya berupa dokumen/arsip, surat kabar, buku catatan, dan sebagainya. Sedangkan, sumber tidak tertulis biasanya berupa artefact (benda-benda peninggalan), sumber lisan (wawancara), dan sebagainya.³⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka dan wawancara. Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, arsip, buku, catatan, foto, maupun data elektronik yang dapat mendukung proses penelitian sejarah. Sementara itu, wawancara merupakan langkah yang dilakukan dengan cara *interview* narasumber secara langsung dan mendalam.³⁹

Peneliti sudah memperoleh beberapa sumber primer dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu buku laporan pemerintah Kabupaten Majalengka “Sewindu Di Madjalengka Maret 1950 – Maret 1958” yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 1958 atas prakarsa Bapak Abdul Aziz Halim selaku Bupati Kabupaten Majalengka kala itu untuk memberikan penghormatan sekaligus tanda kenang-kenangan kepada bupati

³⁷Kumalasari, “Metode Penelitian Sejarah.” Hlm. 2

³⁸Kuntowijoyo, *op.cit.* Hlm. 73

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Hlm. 137.

pendahulunya yaitu Bapak R. Mohammad Nuratmadibrata yang menjabat dari tahun 1950 – 1958.

Peneliti juga mendapat beberapa salinan arsip peraturan pemerintah Kabupaten Majalengka yang diperoleh dari Pak Nana Rohmana (Kang Naro) sebagai pemerhati sejarah Majalengka serta dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka. Arsip-arsip tersebut diantaranya yaitu Peraturan Daerah TK, II Madjalengka No. 12 Tahun 1957 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Madjalengka Gaja Baru, Pengumuman Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Daerah Kabupaten Madjalengka No. 11/Peng/PUPKP/1958 Tentang Gerakan Pembersihan Djalan Besar, Djalan Desa, dan Pekarangan Rumah, Data Hasil Pemungutan Suara PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Madjalengka 10 Agustus 1957, Laporan Tentang Keadaan Desa Smt. II Tahun 1957 Di Kabupaten Madjalengka.

Selain sumber primer berupa arsip-arsip tersebut, peneliti juga akan melakukan pengumpulan data dan informasi berupa wawancara dengan para tokoh yang mengalami kehidupan di tahun 1950-1958 seperti Bapak Sahirin seorang pengrajin genteng Jatiwangi dan Bapak Sutisna seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Ditambah lagi wawancara dengan tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dibidang kesejarahan seperti Bapak Nana Rohmana seorang sejarawan Majalengka, Bapak Lili Solihin seorang pemerhati sejarah PUI Majalengka, dan Bapak Illa Syukrillah Syarief seorang pemerhati sejarah genteng Jatiwangi.

1.6.3 Kritik Sumber

Setelah melakukan pengumpulan sumber, peneliti sejarah harus melakukan tahap kritik sumber. Kritik sumber ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan. Sehingga kemudian diperoleh fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah inilah yang nantinya dikembangkan untuk melakukan penelitian sejarah. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran lepas dengan sistem kartu agar memudahkan pengklasifikasian berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat.

Kritik sumber ini dilakukan dalam dua tahap, pertama kritik eksternal, kemudian kritik internal. Kritik eksternal harus pertama kali dilakukan agar memastikan bahwa sumber tersebut adalah sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini, kemudian agar dapat mengetahui bahwa sumber ini adalah asli atau palsu, dilihat dari kondisi luarannya, seperti kondisi kertasnya (kalau dokumen), gaya tulisannya, gaya bahasanya, keterkaitan dan posisi informan/peneliti dengan peristiwa yang dikaji, dan sebagainya.⁴⁰

Setelah kritik eksternal dan peneliti sudah merasa yakin bahwa informasi dari sumber tersebut dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian, langkah selanjutnya peneliti melakukan kritik internal. Kritik internal merupakan langkah yang dilakukan untuk menguji kredibilitas dan

⁴⁰Wardah, "Metode Penelitian Sejarah." Hlm. 172

reliabilitas terhadap kebenaran isi informasi yang disampaikan oleh sumber tersebut.⁴¹

1.6.4 Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan suatu upaya untuk menafsirkan makna fakta dan hubungan antara fakta dengan fakta lainnya, sehingga fakta-fakta tersebut dapat menjadi kerangka rekonstruksi realitas masa lalu. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti sejarah adalah membuat relasi antar fakta-fakta. Kemudian, dilakukan pemaknaan dan dibuat menjadi sebuah teks interpretasi, sehingga menjadi rangkaian makna yang berdasarkan fakta-fakta yang faktual dan logis tentang peristiwa tersebut.⁴²

1.6.5 Historiografi

Historiografi atau penelitian sejarah adalah sebuah pemaparan hasil dari penelitian sejarah yang telah dilakukan dalam beberapa tahap sebelumnya. Historiografi ini hendaknya dapat memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai proses penelitian yang dilakukan sejak awal hingga akhir.⁴³

Menurut Kuntowijoyo, penyajian historiografi minimalnya ada pengantar, hasil atau pembahasan, dan kesimpulan. Selain itu, aspek kronologis juga sangat penting diterapkan dalam tulisan sejarah tersebut, misalnya adanya angka tahun dan adanya unsur diakronis (memanjang dalam waktu) seperti perkembangan, perubahan, pasang surut, dan sebagainya.⁴⁴

⁴¹*Ibid.* Hlm. 172

⁴²*Ibid.* Hlm. 173

⁴³*Ibid.* Hlm. 174

⁴⁴Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Hlm. 80

1.7. Sistematika Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kondisi Sosial dan politik Kabupaten Majalengka Di Bawah Kepemimpinan Raden Mohamad Nur Atmadibrata 1950-1958” terdiri dari beberapa bagian yang ditandai dengan bab. Bab 1 Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan teoretis, dan metode penelitian.

Selanjutnya di bab II hingga bab IV merupakan hasil penelitian atau pembahasan. Di bab-bab tersebut menyampaikan dua hal utama yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab II membahas tentang kondisi sosial Kabupaten Majalengka tahun 1950-1958, Bab III membahas tentang kondisi politik Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan Raden Mohamad Nur Atmadibrata, dan Bab IV membahas tentang kondisi dinamika yang terjadi pasca pemerintahan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata. Pada Bab V berisi kesimpulan dan saran peneliti dalam bentuk narasi yang berkaitan antara hasil penelitian dengan gagasan saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca.